JPBM
JOURNAL OF POLICY & BUREAUCRACY MANAGEMENT

http://jpbm.fisip-unmul.ac.id

Volume 1 Nomor 2
November 2020

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM LABUAN CERMIN OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

Agus Neksen Neri[1]

[1] Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.
Email nexennery15@gmail.com

History: submitted Nov 16, 2020; revised Nov 18, 2020; accepted Nov 19, 2020

ABSTRACT

Tourism is one of the mainstays of Berau Regency to be developed. Therefore, the Berau District Government has established a number of policies, including increasing the promotion of natural and cultural tourism objects. This study aims to describe and analyse the implementation of the Labuan Cermin tourist destination development program in the Subdistrict of Biduk-biduk by the Berau Regency Culture and Tourism Office. The result of the study shows that the implementation of the Labuan Cermin tourist destination development program in the Subdistrict of Biduk-biduk by the Berau Regency Culture and Tourism Office has done quite well. However, there are several obstacles such as limited budget and area status, limited accessibility to tourist objects, tour and travel agents that have not been well coordinated, lack of public understanding of partnership. The community is quite active in infrastructure development, but there are still some people who are still less concerned with the development that is taking place in their village.

Keywords: *Implementation of tourism programs, tourist destinations, tourism development, natural tourism.*

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan sejumlah kebijakan, diantaranya meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sudah berjalan cukup baik. Namun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran dan status kawasan, keterbatasan aksesibilitas menuju obyek wisata, agen tour and travel yang belum terkoordinir dengan baik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemitraan. Masyarakat sudah cukup aktif dalam pembangunan infrastruktur. Namun masih ada beberapa masyarakat yang masih kurang peduli dengan pembangunan yang terjadi di desa mereka.

Kata Kunci: *Implementasi Program Pariwisata, Destinasi Wisata, Pengembangan Wisata, Wisata Alam.*

Copyright © 2020 JPBM. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata yang akhir-akhir ini banyak disoroti oleh media massa di Indonesia adalah sejalan dengan program pemerintah dalam menjalankan pariwisata sebagai penambahan devisa negara di luar sektor nonmigas. Negara sudah merencanakan program pengembangan dan pembenahan pariwisata sejak tahun 1988 hingga sekarang, hal ini diharapkan dapat menarik kehadiran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang harapannya akan mendatangkan keuntungan bagi pemasukan keuangan negara. Selain itu pengeluaran belanja oleh para wisatawan diharapkan dapat meningkatkan pemasukan masyarakat setempat dan memperluas pengetahuan dan wawasan kebudayaan di bidang pariwisata sebagai bentuk kontak budaya wisatawan dengan wisatawan yang berada dari luar lingkungan budaya setempat.

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam penataan tata ruang wilayahnya, sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan sejumlah kebijakan, yaitu; meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata alam dan budaya, serta mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata.

Prioritas pembangunan Kabupaten Berau yang diletakkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata, berdasarkan RT/RW Kabupaten Berau 2012, menetapkan pengembangan pariwisata melalui perwujudan kawasan pariwisata yang dilakukan dengan:

1. Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata,
2. Pengembangan promosi pariwisata,
3. Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah,
4. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata,
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata,

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menetapkan visi "Terwujudnya Kabupaten Berau sebagai Destinasi Wisata yang terkemuka di Dunia" pada Renstra Tahun 2016-2021.

Khusus terkait pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menetapkan misi antara lain: 1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat, 2. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab.

Di dalam implementasi program pengembangan pariwisata di Labuan Cermin, Kecamatan Biduk-biduk, masih terdapat sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya perawatan pada sarana pariwisata yang telah tersedia, contohnya kapal dayung yang dulunya tersedia untuk pengunjung akibat kurang dirawat akhirnya kini sudah tidak dapat digunakan lagi.
2. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana pariwisata, sebab tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang. Contohnya gazebo sebagai tempat beristirahat hanya tersedia dua buah, tempat pembuangan sampah juga hanya tersedia dua buah. Padahal jumlah pengunjung dapat mencapai 1.500 orang perbulan.
3. Berkurangnya wahana wisata unggulan, seperti beberapa binatang peliharaan dan tanaman-tanaman langka yang dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada.
4. Pengembangan daerah wisata tidak disertai dengan tersedianya pengelola obyek wisata yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan obyek wisata menjadi menarik dan unggul, sebab kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Labuan Cermin masih kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan bidang kepariwisataan, misalnya tentang pengembangan diri dalam melayani wisatawan.

Rangkaian persoalan di atas, merupakan sejumlah masalah yang berkenaan dengan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Sehingga penelitian ini berupanya menganalisis implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau serta faktor penghambatnya.

Penelitian serupa yang meneliti obyek wisata yang sama, yaitu Labuan Cermin adalah penelitian (Setiawan, 2019). Namun, penelitian tersebut mengkaji upaya pengembangan obyek wisata Labuan Cermin dari regulasi kampung Biduk-biduk (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung 2016-2021). Dengan demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi subyek pelaksana pengembangan obyek wisata tersebut, sebab subyek penelitian penulis adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai SKPD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pariwisata.

KERANGKA TEORI

Kebijakan publik atau *public policy* suatu istilah dengan hasil keputusan yang dilakukan oleh pemegang otoritas, dan mengandung arti sebagai serangkaian

tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna mengatasi persoalan agar dapat terciptanya suatu keadaan yang lebih baik, Anderson (dalam Wahab, 2003). Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi permasalahan publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Sedangkan terkait dengan implementasi kebijakan publik, Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2007) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu ataupun kelompok dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Menurut Frederick (dalam Islamy, 2001), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan-tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usaha kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan bidang pariwisata. Fandeli (2001) memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkait di bidang tersebut. Pariwisata menurut Gupa (dalam Yoeti, 2006) adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya.

Kemudian Suwantoro (2004) menyatakan pengertian obyek wisata adalah sumberdaya alam yang berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan serta ditunjuk untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaannya. Sedangkan Fandeli (2001: 58) menyatakan bahwa obyek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah budaya bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Spillane (2006: 29) menyatakan beberapa jenis pariwisata, yaitu: pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*), pariwisata untuk rekreasi (*recreation tourism*), pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), pariwisata untuk olahraga (*sports tourism*), pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*) dan pariwisata untuk berkonveksi (*convention tourism)*.

Pariwisata perlu terus dikembangkan demi keberlanjutannya. Menurut Yoeti (2006), pengembangan pariwisata adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan obyek wisata yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif dan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata yang terdiri dari peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daerah tujuan wisata, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dan pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, serta faktor penghambat implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata diantaranya komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sebagai *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwista Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, sedangkan *informannya* antara lain Kepala Seksi Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Produk Wisata, Kepala Seksi Obyek Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Berau, Pokdarwis wisata di Labuan Cermin dan Pengunjung Objek. Kemudian sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peraturan-peraturan, dokumen dan arsip lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan *(library research)* dan penelitian lapangan *(field work research),* dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: observasi. wawancara. dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Milles Huberman, dan Saldana (2014) yaitu analisis terdiri dari beberapa jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya: kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau. Dalam fungsi pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau memiliki program-program unggulan. Keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata ini dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kawasan wisata, dan pemanfaatan kawasan wisata.

1. **Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata**

   Tujuan program pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas dan intensitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk

kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi untuk mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan wisata berikutnya. Keberhasilan pembangunan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah akomodasi dan fasilitas hiburan bagi wisatawan.

Perolehan data sekunder menunjukkan bahwa keberadaan sarana dan prasaran yang terdapat di Kecamatan Biduk-biduk saat ini masih belum merata di seluruh kawasan wisata yang ada di Kecamatan Biduk-biduk. Kawasan obyek wisata yang memiliki sarana dan prasarana pendukung hanya Labuan Cermin dan Labuan Kelambu. Adapun sarana yang tersedia antara lain perahu motor, dermaga apung, ruang ganti dan gazebo yang telah tersedia di sekitar kawasan obyek wisata tersebut.

Key informan penelitian ini, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menyatakan bahwa:

> "Sejak diterbitkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 290 Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Penunjukan Kawasan Lindung dan Wisata Alam Labuan Cermin di Kecamatan Biduk Biduk, sarana dan prasarana awal yang telah disediakan Pemkab. Berau adalah Dermaga Sandar, Dermaga Apung, toilet dan Ruang Ganti dan Gazebo. Kemudian yang sudah ada sejak awal lantai landasan dan gazebo tambahan, *tracking* menuju toilet dan kamar ganti dan *landmark* Labuan Cermin. Artinya hal ini sudah baik dari yang sebelumnya. Dalam pembangunannya memang kami terhambat pada aksebilitas menuju objek wisata Labuan Cermin, keterbatasan alokasi anggaran dan status kawasan. Selain pembangunan sarana dan prasarana wisata Labuan Cermin juga diperlukan tata kelola wisata yang baik termasuk peningkatan SDM pengelola dan pelaku wisata serta daya tarik/atraksi wisata yang dikemas dalam paket wisata berkelanjutan" (Hasil wawancara 22 April 2020).

Untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata saat ini sudah berlangsung cukup baik, namun saat ini persolan yang sedang dihadapi dalam tahap pembangunan kemjuan wisata Labuan Cermin yaitu terhambat pada aksebilitas menuju objek wisata, keterbatasan alokasi anggaran dan status kawasan. Selain pembangunan sarana dan prasarana wisata Labuan Cermin juga diperlukan tata kelola wisata yang baik termasuk peningkatan SDM pengelola dan pelaku wisata serta daya tarik/atraksi wisata yang dikemas dalam paket wisata berkelanjutan. Meskipun saat ini sarana dan prasarana awal yang telah disediakan mengalami peningkatan seperti adanya dermaga sandar, dermaga apung, gazebo, lantai landasan, *tracking* menuju toilet dan kamar ganti dan *landmark* Labuan Cermin, namun sarana dan prasarana tersebut masih belum mampu memfasilitiasi kebutuhan para wisatawan yang mengunjungi objek wisata Labuan Cermin.

2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Pengembangan daerah tujuan pariwisata tentu merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan bidang pariwisata yang menjanjikan

bagi daerah. Salah satu tolak ukur pada keberhasilan pengembangan destinasi wisata adalah bertambahnya jumlah kunjungan lokal maupun mancanegara.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Labuan Cermin

No	Tahun	Wisatawan Lokal	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
1	2011	1.560	541	2.101
2	2012	2.888	1.298	4.186
3	2013	3.760	3.690	7.450
4	2014	7.894	5.365	13.259
5	2015	12.881	9.623	22.504
	Total	**28.983**	**20.517**	**49.500**

Sumber: Data Tahunan Karcis Masuk Wisata Danau Labuan Cermin, 2020.

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan terus-menerus yang pesat dari kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini memberikan gambaran bahwa minat wisatawan terhadap obyek wisata Labuan Cermin sangat tinggi sehingga diperlukan upaya pengembangan yang berkelanjutan terhadap obyek wisata alam Labuan Cermin.

Adapun kekhasan obyek wisata Labuan Cermin yang menarik minat wisatawan berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, yaitu:

> "Perbedaan wisata ini adalah keindahan alam wisata air, ini akan jarang dijumpai di tempat lain dan akan memberikan panorama yang luar biasa untuk dikunjungi. Hal yang perlu pengunjung ketahui bahwa selain keunggulan itu, wisata ini juga memiliki keunikan dengan danau dua rasa yakni tawar dan asin. Kami selalu konsisten mempertahankan wisata ini dengan terus menambah sarana dan prasarana dalam pelayanan ini. Dalam mempertahankan hal tersebut kami berusaha meningkatkan sarana dan prasarana, promosi terus-menerus kemudian melatih sumberdaya manusia kami. Tidak bisa dipungkiri hambatan kami adalah berkaitan dengan anggaran dan akses menuju tempat ini. Wisata ini adalah wisata berwawasan lingkungan jadi lingkungan harus tetap terjaga terus menerus" (Hasil wawancara 22 April 2020).

Untuk pengembangan daerah tujuan wisata Labuan Cermin, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau melakukan kerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang lebih menunjang keunggulan obyek wisata tersebut. Walaupun di dalam pengelolaannya masih terhambat oleh masalah anggaran dan akses menuju obyek wisata yang berbasis lingkungan alam sehingga memiliki resiko dari kerusakan alam dari lonjakan pengunjung dan kurangnya kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan lingkungan

obyek wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga melakukan peningkatan kualitas SDM pariwisata di sekitar Labuan Cermin melalui pelatihan-pelatihan bagi pengelola obyek wisata.

3. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Pengembangan destinasi wisata juga perlu didukung dengan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dalam rangka melakukan promosi tujuan wisata. Sebab tanpa promosi, maka suatu obyek wisata tidak akan mampu meraih kunjungan wisata yang menjanjikan bagi pemasukan daerahnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, tercatat ada 12 agen *tour & travel* resmi yang terdaftar. *Tour & travel* ini menawarkan berbagai paket-paket wisata yang beragam, diantaranya paket wisata tirta, wisata alam, wisata susur sungai, wisata *trancking* dan wisata edukasi. Keseluruhan paket wisata tersebut memiliki harga yang bervariasi tergantung pada jumlah peserta *tour* serta estimasi waktu perjalanan yang sebelumnya telah ditentukan oleh wisatawan.

Hingga saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah melakukan promosi secara luas mengenai ragam paket wisata unggulan yang ada, namun kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengkoordinasi sebagian besar *tour & travel* serta sulitnya mengkondisikan agen *tour and travel* dari luar daerah Kabupaten Berau yang juga menawarkan destinasi wisata yang sama.

Untuk tarif yang diberikan oleh masing-masing agen *tour & travel* di wilayah Kabupaten Berau pun masih beragam dan belum ada acuan resmi mengenai tarif. Kepala Seksi Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mengatakan bahwa:

> "Kami terkendala oleh *travel* yang tidak terkoordinir. Mereka menaikkan dan menurunkan harga seenaknya. Ini menyebabkan ketidakpercayaan pengunjung" (Hasil wawancara 22 April 2020).

Namun demikian, upaya pengembangan wisata unggulan untuk Labuan Cermin telah pula dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan pihak-pihak lain. Sebagaimana pernyataan Ketua Pokdarwis Kecamatan Biduk-biduk, bahwa:

> "Pembangunan pariwisata Labuan Cermin khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Berau telah menjalin kerjasama dengan masyarakat dan untuk pihak lain sebatas NGO dan BUMK yang saat ini menjadi pengelola Labuan Cermin. Pola koordinasi antara Pemkab dengan Pokdarwis/Masyarakat dalam membangun dan mengembangkan Labuan Cermin sebagai objek wisata uanggulan, masih sebatas koordinasi dan Bimtek, juga masih terbatas dan tidak rutin hanya sesuai kebutuhan atau keperluan, pola koordinasi belum terstruktur dan terorganisir" (Hasil wawancara).

Dengan demikian, maka pengembangan jenis dan paket wisata unggulan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Berau, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah masih belum terkoodinirnya *tour &*

travel secara baik, banyaknya paket biro perjalanan wisata (terutama dari Tarakan) serta bervariasi tarif yang ditawarkan oleh masing-masing *tour & travel* untuk wisata alam ke Labuan Cermin. Walaupun pengembangan lanjutan yang sedang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau yakni eksplor pengembangan Sungai Asam dan Labuan Kelambu juga masih terus dilakukan.

4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha

Program peningkatan sumberdaya pengelola pariwisata adalah salah satu program yang diharapkan dapat meninggkatkan sumberdaya manusia di bidang wisata dengan tujuan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya pengelola objek-objek wisata secara profesional. Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbiotik antar sektor.

Dalam pengembangan destinasi wisata alam Labuan Cermin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu para pelaku usaha atau pengusaha:

Tabel 2. Jumlah Usaha Binaan Bersama di Kecamatan Biduk-biduk

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Rumah singgah *(home stay)*	9
2	Kuliner khas Biduk-biduk	3
3	Galeri pernak-pernik	2
4	Pokdarwis	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, 2020.

Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melibatkan masyarakat lokal sebagai penunjang kemajuan wisata di Kecamatan Biduk-biduk, termasuk obyek wisata Labuan Cermin, yang seluruhnya berjumlah 15 aset sebagaimana terinci pada tabel 2. Sedangkan untuk perencanaan ke depan, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, bahwa:

> "Dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Labuan Cermin, dalam perencanaan ke depan, akan ada penambahan jumlah pihak lain yang digandeng Pemerintah Berau untuk kerjasama di bidang pembangunan pariwisata di Labuan Cermin dalam bentuk koordinasi dan pembinaan, melibatkan pihak BUMN/Swasta, Perbankan dan LSM" (Hasil wawancara 22 April 2020).

Untuk pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha telah berlangsung dengan baik. Perwujudan bentuk implementasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau terkait pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Labuan Cermin, selama ini pemerintah Berau khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau menjalin kerjasama dengan pihak lain sebagai bentuk perencanaan ke depan untuk melakukan penambahan jumlah pihak lain yang digandeng pemerintah Berau dalam kerjasama di bidang pembangunan pariwisata di Labuan Cermin melalui koordinasi dan pembinaan yang melibatkan pihak BUMN/Swasta, Perbankan dan LSM.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Alam Labuan Cermin

1. **Komunikasi**
   Masyarakat dan Pokdarwis memang belum mengetahui secara jelas tujuan dari program pengembangan destinasi wisata yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Berau dikarenakan mereka kurang memahami maksud dan tujuan.
2. **Sumberdaya**
   Sumberdaya di dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata Kabupaten Berau memiliki pelaksana lapangan yang kurang memadai. Dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau bekerjasama dengan pihak lain Dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau namun belum belum maksimal.
3. **Struktur Birokrasi**
   Sumberdaya di dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata Kabupaten Berau memiliki pelaksana lapangan yang kurang memadai.
4. **Disposisi**
   Disposisi dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata Labuan Cermin meliputi komitmen pelaksana yang sudah tinggi untuk melaksanakan programnya, tetapi karakteristik pelaksana yang menyesuaikan dengan kearifan lokal masih kurang menjamin adaptasi dan sosialisasi program terhadap sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga sebagian kegiatan masih belum mendapat dukungan yang baik dari masyarakat akibat hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara umum implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sudah cukup baik namun dalam pelaksanaanya masih terdapat hambatan. Kesimpulan secara khusus sesuai sub fokus penelitian:
   a. Pembangunan sarana prasarana pariwisata telah dilakukan namun terhambat oleh aksesibilitas menuju obyek wisata Labuan Cermin, keterbatasan anggaran dan status kawasan.
   b. Pengembangan daerah tujuan wisata telah dilaksanakan namun masih terhambat oleh permasalahan keterbatasan anggaran dan aksesibilitas menuju obyek wisata.
   c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan masih kurang baik sebab terhambat pada agen *tour & travel* yang belum terkoordinir dengan baik, banyaknya biro paket perjalanan wisata melalui Tarakan dan tarif yang di tawarkan masing-masing *tour & travel* masih bervariasi.
   d. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga/dunia usaha telah dilakukan namun masih kurang mendapatkan respon yang baik dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemitraan yang dilakukan.
2. Faktor yang menjadi penghambat implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau antara lain aksesibilitas menuju obyek wisata Labuan Cermin, keterbatasan anggaran dan permasalahan status kawasan yang menjadikan upaya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan daerah tujuan wisata belum berhasil, koordinasi yang masih lemah antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan pengusaha *tour & travel* dalam hal pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha maupun Pokdarwis terkait kemitraan yang dapat dilakukan bersama pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau untuk pembangunan obyek wisata.

Berdasarkan kesimpulan, berikut ini beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian:

1. Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Berau perlu mengusulkan kepada Bupati Berau untuk menjadikan Labuan Cermin sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata sesuai dengan keunggulannya, agar pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dapat dilakukan dengan baik melalui dukungan ketersediaan anggaran, penyelesaian sengketa status kawasan dan sosialisasi program pemerintah tersebut kepada Pokdarwis dan masyarakat untuk dapat dukungan yang lebih baik.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau perlu mengkomunikasikan kepada para pengusaha *tour* & *travel* tentang standarisasi penetapan tarif paket wisata untuk mengatasi variasi tarif perjalanan wisata dalam rangka koordinasi promosi destinasi wisata yang lebih baik.
3. Dari sisi kualitas sumber daya manusia perlu diperlukan adanya pelatihan khusus dan memadai demi meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tiap-tiap personil lapangan yang langsung bersentuhan dengan tata kelola dan pelaksanaan pariwisata Labuan Cermin, serta perlunya penambahan jumlah personil lapangan diharapkan dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai penunjang pengembangan kawasan wisata Labuan Cermin.
4. Perlunya meningkatkan komitmen bersama di segala sektor dalam mengatur tatakelola pembangunan wisata Labuan Cermin yang didukung dengan adanya kerjasama yang transparan dan terarah oleh seluruh penyelengara serta pembuat kebijakan yang berorientasi menunjang seluruh komponen keberhasilan pembangunan pariwisata di Kabupaten Berau.

PERSANTUNAN

Artikel ini merupakan bagian dari Skripsi penulis pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang dihasilkan di bawah bimbingan Dr. Fajar Apriani, M.Si. selaku Pembimbing I dan Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing II.

DAFTAR PUSTAKA

Fandeli, Chafid. (2001). *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataan Alam*. Yogyakarta: Liberty Offset.

Islamy, M. Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.

Nawawi, Hadari. (1999). *Metode Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nugroho, Riant. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau.

RPJMD Kabupaten Berau, Tahun 2016-2021.

RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2011-2012.

Setiawan, Badri Husni. (2019). Studi tentang Pengembangan Obyek Wisata Labuan Cermin di Kampung Biduk-biduk Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu*

Pemerintahan, Volume 7 Nomor 1, 2019, hal 271-284. Diunduh dari https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(01-16-19-05-33-52).pdf pada 18 November 2020.

Spillane, James J. (2006). *Pariwisata dan Wisata Budaya*. Yogyakarta: CV Rajawali.

Suwantoro, Gamal. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wahab, Solichin Abdul. (2003). *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Dari Formulasi Ke *Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

_____. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yoeti, Oka A. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

PROFIL PENULIS

Agus Neksen Neri, merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda angkatan 2013. Lahir di Kampung Baru pada 28 Agustus 1996. Menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana bidang Administrasi Publik pada Juni 2020.